

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Rasyid Thalib, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016)

Ashshofa Burhan, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2004)

Hari Sabarno, Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)

Janedjri M. Gaffar et al. (ed.), Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI dan UNDP, 2003)

Janedjri M. Ghaffar., dkk, (Edt), . DPD dalam Sistem Ketatanegaraan RI, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR dan UNDP, 2002)

Jazim Hamidi dkk, Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2008)

Jazim Hamidi dan Kemilau Mutik, Legislative Drafting, (Yogyakarta: Tatas media, 2011)

Jimly Asshiddiqie, Menjaga Denyut Nadi Konstitusi : Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Konstitusi Press, 2004)

_____, Perkembangan dan Konsolidasi lembaga Negara Pasca Reformasi, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006)

_____, Konstitusi Bernegara: Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis, (Malang: Setara Pers, 2015)

Muammar Himawan, Pokok-Pokok Organisasi Modern, (Jakarta: Bina Ilmu., 2004)

Ni'matul Huda, Pengawasan Pusat Terhadap Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Yogyakarta: FH UII Pers, 2007)

_____, Hukum Pemerintahan Daerah, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2009)

Patanairi Siahaan, Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012)

Prajudi Admosudirjo, Teori Kewenangan, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001)

Robert R. Mayer dalam Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1996)

Soerjono, Soekamto, Pengantar Penulisan Hukum, (Jakarta: UI-Press, 1982)

Titik Triwulan T, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, (Jakarta: Kendana, 2011)

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Produk Hukum Daerah.

Permenkumham Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PP.05.01 Tahun 2016 Tentang Pedoman Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016

C. Jurnal

Devyanti Ramadhani. 2018. “Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah Pada Tahapan Evaluasi Dan Klarifikasi”, *Badamai Law Journal*, Vol. 3, Issues 2

Triya Indra Rahmawan. 2018. “Mendudukan Lingkup Pemantauan dan Evaluasi Peraturan Daerah Oleh Dewan Perwakilan Daerah”, *Jurnal Sapientia et Virtus* , Volume 3 Nomor 1

Yuswanto dan M. Yasin Al Arif. 2018. “Diskursus Pembatalan Peraturan Daerah Pasca Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 dan No. 56/PUU-XIV/2016”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 15, Nomor 4

Wahyu Tri Hartono. 2018. “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016 Tentang Pembatalan Perda Provinsi, Perda Kabupaten/Kota, Peraturan Gubernur, dan Peraturan Bupati/Peraturan Walikota”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 15 Nomor 2

D. Internet

Humas, Sekretariat Kabinet, “Hambat Kapasitas Nasional, Presiden Jokowi: Pemerintah Batalkan 3143 Perda Bermasalah”, <https://setkab.go.id/hambat-kapasitas-nasional-presiden-jokowi-pemerintah-batalkan-3143-perda-bermasalah/https://setkab.go.id/hambat-kapasitas-nasional-presiden-jokowi-pemerintah-batalkan-3143-perda-bermasalah/>, (Diakses Pada 20 Oktober 2019 Pukul 20:00 WIB)

E. Wawancara

Agustinus Yosy Setyawan, S.H., M.H. , Kepala Bidang Hukum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah
Bapak Paujan, S.H., M.Hum Kepala Sub Bagian Perundang-undangan dan Pengkajian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah

